

**PERMASALAHAN SOSIAL EKONOMI DI KALANGAN
AGEING HOUSEHOLD DI DAERAH TERPENCIL
(Studi Kasus di Cilincing dan Gorontalo)**

Fitrianatsany¹, Muhammad Alhada Fuadilah Habib²
^{1,2}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
fitrianatsany90@gmail.com¹, habibhada@gmail.com²

Abstrak: Kemiskinan dan kesenjangan sosial sampai saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia, tidak terkecuali pada masyarakat berusia lanjut di daerah terpencil. Dalam penelitian ini penulis mengangkat isu mengenai masyarakat lanjut usia yang mengalami ketidakadilan di bidang sosial-ekonomi di daerah terpencil yaitu di Cilincing, Timur Tengah Selatan dan Gorontalo. Teori yang penulis gunakan adalah teori dari Rawls tentang teori kontrak atau sering disebut dengan *The Original Position*. Selanjutnya penulis juga menggunakan teori pembangunan menurut *Meter dan Horn*, mereka membagi lima variabel yang mempengaruhi implementasi dari pembangunan sosial yaitu (1) Standar dan sasaran kebijakan (2) Sumber daya (3) Komunikasi antar anggota dan penguatan aktivasi (4) Karakteristik agen pelaksana dan (5) Kondisi Sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data studi literatur. Adapun penyebab permasalahan kemiskinan dan keenjangan sosial dikalangan masyarakat berusia lanjut meliputi keterpencilan dan keterbelakangan, keterbatasan kemampuan mengakses berbagai pelayanan sosial dasar karena ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, keresahan sosial, serta konflik sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial-ekonomi sampai saat ini masih diwarnai dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya konvensional dan perlu ditangani secara bersama antara pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kata Kunci: Kesenjangan Sosial, Kemiskinan, Ageing Household, Kesejahteraan

Abstract: Poverty and social inequality are still a problem in Indonesia, including the elderly in remote areas. In this study, the authors raise the issue of elderly people who experience injustice in the socio-economic field in remote areas, namely in Cilincing, South

Middle East and Gorontalo. The theory that the writer uses is Rawls's theory of contract theory or often called The Original Position. Furthermore, the authors also use development theory according to Meter and Horn, they divide five variables that influence the implementation of social development, namely (1) Policy standards and objectives (2) Resources (3) Communication between members and strengthening activation (4) Characteristics of implementing agents and (5) Social, economic and political conditions. This research uses a qualitative approach with data collection techniques of literature studies. The causes of the problem of poverty and social inequality among the elderly include remoteness and underdevelopment, limited ability to access various basic social services due to social disability, disability, neglect, social unrest, and social conflict. Socio-economic welfare problems are still characterized by problems that are conventional in nature and need to be handled jointly by the government, the community, social organizations and non-governmental organizations.

Keywords: *Social Inequality, Poverty, Aging Household, Welfare*

Pendahuluan

Secara geografis wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Dari jumlah penduduk tersebut tidak semuanya berada pada tingkat kesejahteraan yang memuaskan terlebih ketika Indonesia mengalami krisis finansial atau sering disebut dengan krisis moneter. Penduduk yang berada di garis kemiskinan semakin bertambah. Krisis yang dialami oleh Indonesia sampai beberapa tahun terakhir telah meningkat menjadi krisis multidimensi yang berdampak luas pada kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial menjadi semakin memburuk baik dari segi jumlah maupun jenisnya seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial dan kriminalitas yang semakin bertambah dari tahun ketahun serta munculnya konflik-konflik antara aparat dengan warga maupun aparat dengan aparat dan lain sebagainya.

Dari munculnya permasalahan sosial yang berkembang begitu cepat juga harus dapat ditangani dengan cepat dan tepat pula. Upaya tersebut bukan hanya menjadi tugas dari Kementerian sosial saja namun juga harus ada kerjasama dengan masyarakat luas, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat termasuk juga diantaranya adalah dunia usaha. Itulah sebabnya tingkat kesejahteraan sosial warga negara Indonesia harus benar-benar memperoleh perhatian yang penting dari pemerintah guna meningkatkan ketahanan sosial dari segala bidang untuk mencegah sebuah ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Indonesia yang merupakan bagian dari dunia global ini harus turut serta dalam melakukan upaya-upaya yang disepakati bersama dalam mengatasi permasalahan sosial sesuai dengan komitmen internasional disamping memecahkan permasalahan yang berada di dalam negara sendiri.¹ Dari berbagai program-program kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah namun bencana sosial dan permasalahan sosial yang semula dianggap dapat diatasi oleh masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat/LSM, ternyata belum seluruhnya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Di tengah pergaulan dunia pada era globalisasi ini, pemerintah Indonesia terikat pada komitmen hasil Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Pembangunan Sosial (KTTD-PS) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark pada bulan Maret 1995 yang pada sebelumnya muncul dalam SU-PBB tahun 1992 tentang situasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di dunia.² Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial

¹ Bachtiar Chamsyah, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial", (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2002), hlm. 2

² Bachtiar Chamsyah, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial", hlm, 7

ini muncul di Indonesia dalam bentuk pengangguran yang meningkat, dan disintegrasi sosial yang semakin memperihatinkan.

Pengangguran, kemiskinan dan integrasi sosial sangat erat kaitannya. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan dapat pula menyebabkan pengangguran. Orang miskin ditandai dengan rendahnya pendapatan, pendidikan, keterampilan dan akses ada sumber-sumber informasi serta kesempatan sosial akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran dan kemiskinan pada akhirnya akan menimbulkan disintegrasi sosial. Kurang meratanya sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang akan mudah menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Disintegrasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik. Heterogenitas kultural, institusi-institusi politik yang kurang demokratis, rendahnya penghargaan kepada hak asasi manusia, diskriminasi sosial dapat pula menimbulkan disintegrasi sosial.³

Hal tersebut menunjukkan terjadinya kegagalan dari pembangunan di tingkat ekonomi. Kegagalan pembangunan ekonomi akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya di Indonesia. pembangunan sosial merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara sempurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi perhatian dari pembangunan sosial ini adalah mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan

³ Edi Suharto, "Analisis Kebijakan Sosial", (Bandung: IKAPI, 2008), hlm. 22-23

kemiskinan. Secara sempit pembangunan sosial dapat diartikan juga sebagai pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial berorientasi pada peningkatan keberfungsian sosial kelompok-kelompok tidak beruntung yang meliputi fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, pekerja anak, keluarga rentan wanita rawan sosial ekonomi dan komunitas adat lokal.⁴

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menyadari akan perlunya pembangunan sosial di sektor kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial yang merupakan jenis permasalahan sosial utama sehingga memerlukan penanganan secara khusus dan berkesinambungan. Dengan adanya pembangunan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pembangunan dapat dipandang sebagai investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi salah satu solusi terhadap kesenjangan ekonomi, kecenderungan primodialisme dan eksklusivisme yang akan berdampak pada terjadinya friksi dan konflik, disintegrasi sosial dan bahkan hilangnya eksistensi bangsa.

Sementara itu setelah terjadinya perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik menuju desentralistik merupakan penjabaran dari kebijakan politik pemerintah yang memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama dari pembangunan. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah terutama kabupaten/kota

⁴ Edi Suharto, "Analisis Kebijakan Sosial", hlm. 23

untuk menyelenggarakan pembangunan. Akan tetapi kewenangan tersebut terkadang memberikan akses negatif yang mestinya perubahan tersebut harus disikapi secara arif, bijaksana dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota.⁵

Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 4 Juli 2019 melalui website <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/> dengan tema Indoensia Memasuki Periode *Aging Population* menjelaskan bahwa saat ini masyarakat Indonesia telah memasuki periode *aging population* yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa atau 7,56 per sen pada tahun 2010 kemudian menjadi 25,9 juta jiwa atau 9,7 per sen pada tahun 2019 lalu dan diprediksi terus meningkat pada tahun 2035 menjadi 45,2 juta jiwa. Berdasarkan penjelasan tersebut masyarakat muda perlu memperhatikan para *ageing*/orang tua rentan agar mereka tetap sehat, produktif, dan mandiri. Oleh sebab itu peran keluarga sangat penting dalam merawat dan menjaga *ageing*. Ketika *ageing*/orang tua rentan memasuki situasi dan keadaan membutuhkan pelayanan jangka panjang karena mengalami penuaan dengan sangat cepat maka kebiasaan demensia juga meningkat dengan cepat sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga jika permasalahan tersebut ditindak dengan baik maka dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara pula. Dalam permasalahan ini penulis akan mengangkat isu tentang *ageing*/orang tua yang mengalami ketidakadilan dalam tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil seperti di Cilincing, Timur Tengah Selatan dan Gorontalo.

⁵ Habib, M. A. F. (2015). *Pergeseran Nilai dan Dukungan Sosial Keluarga pada Orang Tua Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Lansia Miskin di Kabupaten Blitar)*. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Penulis mengambil lokasi tersebut karena di daerah Indonesia bagian timur sampai saat ini masih perlu banyak perhatian baik dari masyarakat luas maupun pemerintah terkait dengan kesejahteraan hidup mereka. Hal itu disebabkan peningkatan jumlah *ageing* karena tingkat sosial ekonomi masyarakat meningkat, kemajuan pada bidang pelayanan baik kesehatan maupun sosial, dan juga peningkatan pengetahuan masyarakat yang tiap tahun meningkat⁶, sehingga menyebabkan *ageing* ditelantarkan oleh kaum muda yang lebih memilih hidup di kota dan menitipkan *ageing* ke panti jompo ataupun di rumah. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah kemiskinan meliputi keterpencilan dan keterbelakangan, keterbatasan kemampuan mengakses berbagai pelayanan sosial dasar seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran keresahan sosial dan konflik sosial serta pengungsi. Sebab permasalahan kesejahteraan sosial sampai saat ini masih diwarnai dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya konvensional dan perlu ditangani oleh pemerintah dan masyarakat luas baik organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

Kajian Pustaka

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut khususnya tentang *ageing*/orang tua usia lanjut. Masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Berikut beberapa teori mengenai implementasi dari kebijakan-kebijakan sosial tersebut kepada *ageing*/orang tua lanjut usia diantaranya adalah

⁶ AA Raka Riani Tanaya dan I Gusti Wayan Murjana Yasa, "Kesejahteraan Lansia dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhi di Desa Daging Puri Kauh", (Jurnal Piramida Vol, XI No. 1), hlm. 80-12

pertama, teori dari Rawls yang mengaitkan langsung teorinya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerjasama sosial yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan prinsip keadilan yang harus menjadi subjek struktur dasar masyarakat harus merupakan hasil persetujuan awal dalam situasi prosedural murni. Dengan dasar pemikiran tersebut pilihan logis adalah kembali pada teori kontrak yang sudah klasik dari Rawls yang disebut sebagai *The Original Position* atau yang sering disebut sebagai posisi awal. Dalam teori kontrak Rawls ini mengemukakan bahwa orang-orang bebas dan rasional yang menaruh minat memajukan kepentingan-kepentingannya akan menerima di dalam posisi awal prinsip kesamaan (*equality*) sebagai yang mendefinisikan syarat-syarat fundamental ikatan mereka.⁷

Meskipun *original position* ini dimaksud hanya sebagai konsep heuristik atau konsep yang iba setelah setelah tidak diperlukan lagi namun Rawls menganggapnya sebagai interpretasi standar atas teori kontrak tradisional yang diterapkan dalam teori moral dan dipahami juga sebagai interpretasi atas konsep otonomi dan imperatif kategoris Kant. Teori kontrak ini biasanya dilihat sebagai semacam perjanjian saling menguntungkan karena penggunaan konsep kontrak pada teori moral sering menjadi mangsa empuk kritik. Namun Rawls disini memahami teori kontrak tersebut sebagai tingkat abstraksi tertentu. Rawls menggunakan teori kontrak bukan sebagai cara untuk melegitimasi negara melainkan untuk melegitimasi prinsip moral.

Seperti yang sudah dijelaskan, Rawls mengaitkan langsung teorinya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerjasama sosial

⁷Bur Rasuanto, "Keadilan Sosial: Pandangan Deontologi Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern", (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 53

yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sedangkan prinsip keadilan yang harus menjadi subjek struktur dasar masyarakat harus merupakan hasil dari persetujuan awal dalam situasi prosedural murni. Tetapi seperti pada sistem kerjasama sosial, keadilan tidak lagi ditentukan oleh orang atau masing-masing warga melainkan oleh sistem dan prinsip pelaksanaannya. Keadilan prosedural murni tidak seperti pembagian sembako secara cuma-cuma yang dilakukan oleh pemerintah atau subsidi kepada kelompok tertentu di dalam masyarakat. Praktik seperti itu bukan merupakan keadilan prosedural murni melainkan keadilan alokatif dimana mereka yang menghasilkan nikmat tersebut. Keadilan alokatif bisa mengarah ke utilitarianisme.⁸

Kedua, teori pembangunan menurut Meter dan Horn, mereka membagi lima variabel yang mempengaruhi implementasi dari pembangunan sosial tersebut yaitu (1) standar dan saaran kebijakan (2) Sumberdaya (3) Komunikasi antar anggotadan penguatan aktivasi (4) Karakteristik agen pelaksana dan (5) Kondisi Sosial, ekonomi dan politik.⁹

Dalam hal ini standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tersebut kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen. Masalah ini persis seperti masalah yang dialami oleh *aging* yang mengalami kesenjangan sosial dalam bantuan sosial. Selanjutnya adalah sumberdaya, bahwa dalam implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik manusia maupun non manusia. Dalam berbagai kasus program pemerintah seperti

⁸Bur Rasuanto, "Keadilan Sosial: Pandangan Deontologi Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern", hlm. 52

⁹ AG. Subarsono, "Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 99

program jaringan pengamanan sosial untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan studi literatur yang diambil dari beberapa bahan seperti jurnal, buku dan juga informasi yang ada di website tentang *ageing* yang ada di Indonesia. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pengumpulan data arsip untuk mendapatkan data primer dan sekunder berdasarkan basis data yang berkaitan dengan *ageing* di daerah-daerah terpencil dan padat penduduk seperti Cilincing, Timur Tengah Selatan dan Gorontalo. Tempat-tempat tersebut diambil dikarenakan merupakan daerah yang perlu diberikan perhatian dalam permasalahan sosial, ekonomi dan juga kemiskinan.

Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan dalam hal ini dimaksudkan sebagai kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksisosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat terjadi dan muncul dalam berbagai dimensi negatif seperti keterpencilan, keterasingan, ketergantungan dan keterbatasan kemampuan mengakses berbagai pelayanan sosial dasar¹⁰. Selain itu kemiskinan juga menjadi faktor pendukung munculnya masalah kesejahteraan sosial lainnya. Selain masalah kemiskinan ada masalah lain yang dialami oleh orang tua atau *ageing* yakni keterlantaran.

¹⁰ Habib, M. A. F., Nisa, K. K., Fatkhullah, M., Al Ursah, C. R., & Budita, A. K. (2022). *Sosiologi Ekonomi: Kajian Teoretis dan Contoh Penerapan*. Tulungagung: Akademia Pustaka

Keterlantaran disini dimaksudkan sebagai pengabaian pemerintah terhadap orang tua-orang tua miskin dan terpinggirkan khususnya bagi yang lanjut usia dikarenakan berbagai sebab dan alasan¹¹. Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui buku, jurnal dan juga media elektronik yang membahas tentang ageing/orang tua rentang yang perlu diberikan perhatian lebih baik dari keluarga maupun tetangga dan juga masyarakat serta pemerintah sebab *ageing* saat ini masuk pada taraf yang memprihatinkan karena masalah sosial, ekonomi dan juga tidak dirawat oleh anak maupun keluarganya. Rawls mengaitkan langsung teorinya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerjasama sosial yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sedangkan prinsip keadilan yang harus menjadi subjek struktur dasar masyarakat dan merupakan hasil dari persetujuan awal dalam situasi prosedural murni. Perlu untuk diketahui bahwa jumlah orang tua lanjut usia (*ageing*) dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga kompleksitas permasalahannya semakin bertambah, padahal keberhasilan pembangunan tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk orang tua lanjut usia di dalam struktur kependudukan. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah ini akan semakin menjadi kompleks ketika pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan pelayanan sosial bagi para orang tua yang lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram melalui usaha pelemagaan bagi para orang tua yang lanjut usia.

¹¹ Habib, M. A. (2015, Februari). Pergeseran nilai dan dukungan sosial keluarga pada orang tua lanjut usia (studi kasus pada lansia miskin di kabupaten blitar). *Komunitas*, IV(2), 1-10. Dipetik Desember 21, 2020, dari [http://journal.unair.ac.id/Kmnts@pergeseran-nilai-dan-dukkungan-sosial-keluarga-pada-orang-tua-lanjut-usia-\(studi-kasus-pada-lansia-miskin-di-kabupaten-blitar\)-article-9593-media-135-category-8.htm](http://journal.unair.ac.id/Kmnts@pergeseran-nilai-dan-dukkungan-sosial-keluarga-pada-orang-tua-lanjut-usia-(studi-kasus-pada-lansia-miskin-di-kabupaten-blitar)-article-9593-media-135-category-8.htm)

Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh tentang ketidakadilan yang dialami oleh *ageing*/orang tua lanjut usia. Seperti yang dijelaskan pada buku *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia* bahwa di daerah pedesaan beberapa responden dengan kepala rumah tangga yang berusia lebih dari 40 tahun mengalami rasa ketidakadilan tentang program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah. Dari waktu ke waktu mereka ekerja dengan keras dan berhasil mengumpulkan harta bendanya untuk dapat membangun rumah dengan dinding kayu dan lantai semen. Namun mereka mengalami kesulitan dalam hal konsumsi seperti yang orang lain konsumsi. Mereka tidak mampu untuk memberikan makan keluarga mereka sepanjang tahun dan butuh perjuangan untuk menyekolahkan anak mereka. Namun mereka menemukan sendiri secara khusus dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikarenakan kualitas rumah mereka tersebut. Walaupun mereka memiliki rumah dengan kualitas yang lebih baik namun mereka merasa dalam posisi yang tidak menyenangkan dibandingkan dengan tetangga-tetangga mereka yang jauh lebih muda di Timur Tengah Selatan dan juga Gorontalo. Hal ini dikarenakan tetangga mereka memiliki rumah dengan atap jerami dan masih berlantaikan tanah.

Dengan kemampuan penghasilan mereka yang menurun sejumlah responden yang lebih tua yang masih memiliki anak-anak kecil mengatakan mereka tidak akan mampu membayar dan mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Sebab aset yang mereka kumpulkan tidak mudah dikonversi ke dalam uang tunai. Menurut responden yang diwawancarai mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan survey tersebut hanya melihat dari kondisi rumah saja dan tidak menayakan secara langsung kepada kepala rumah tangga yang miskin tersebut. namun terkadang ada

seseorang yang memiliki rumah bagus namun sangat miskin sebab beberapa tahun yang lalu mereka dapat bekerja namun pada saat ini mereka sudah tidak bekerja lagi. Hal ini penting untuk dicatat bahwa responden yang berada di daerah perkotaan juga melaporkan mengalami tekanan pada pendapatan saat mereka tumbuh dewasa. Bahkan beberapa orang di usia tiga puluhan yang telah memiliki istri mengatakan mereka telah mengalami penurunan pendapatan, meskipun mereka tidak berpendapat bahwa hal tersebut sepenuhnya untuk usia, meskipun sehat dan mampu bekerja, mereka mengatakan bahwa mereka kurang diminati oleh pengusaha baik sebagai buruh harian dan pekerja pabrik. Mereka mengatakan kompetisi untuk pekerjaan telah ditingkatkan dan potensi penghasilan mereka menurun saat mereka bertambah tua.¹²

Inilah sebagai gambaran yang dialami oleh sebagian orang tua yang rentan akan kemiskinan / *ageing household* yang butuh bantuan dana dari pemerintah seperti BLT untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka mempunyai rumah yang lebih bagus dibandingkan orang lain namun untuk kebutuhan sehari-hari mereka sangat kekurangan bahkan untuk menyekolahkan anak mereka juga butuh perjuangan. Hal ini dikarenakan para penyurvei dari kota hanya melihat bentuk fisik rumah saja dan tidak melihat kualitas seseorang yang ada khususnya bagi orang tua yang rentan dan benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Memang mereka dapat membangun rumah yang bagus disaat mereka masih bekerja namun pada saat ini mereka sudah tidak bekerja lagi dan mengalami penurunan dalam pendapatan mereka. Oleh sebab itu pemerintah harus benar-benar jeli dalam melihat permasalahan tersebut

¹² Lisa Hannigan, "Social Assistance: Understanding The Gaps" dalam *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*", ed Chris Manning dan Sudarno Sumarto (Singapore: ISEAS, 2011), hlm. 339-340

agar tidak salah dalam memberikan bantuan atau dengan istilah tidak tepat sasaran. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat isu tentang orang tua/*ageing* sebab orang tua saat ini membutuhkan perlindungan dan juga jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pembangunan sosial dan juga kesejahteraan sosial.

Dari kasus yang dialami oleh orang tua yang rentan di daerah terpencil seperti Cilincing yang ada di Jakarta, Timur Tengah Selatan di NTT dan juga Gorontalo tersebut penulis akan memberikan tawaran dalam merespon penyelesaian permasalahan tersebut yaitu dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga pemimpin desa tersebut baik Kepala daerah maupun kepala dusun yang lebih mengetahui kondisi keadaan rumah tangga penduduknya yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat. Sebab dengan adanya komunikasi tersebut pemerintah juga akan mengetahui tentang kondisi masyarakatnya. Sehingga apabila harus ada warga yang membutuhkan pertolongan maupun bantuan pemerintah segera sigap dalam menanganinya dan agar tidak salah sasaran.

Orang tua yang rentan juga membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah disamping usianya yang telah menua juga mereka butuh bantuan untuk mengcover kehidupan mereka baik dari segi kesehatan, ekonomi dan tempat tinggal. Sebab banyak responden dari buku tersebut mengatakan bahwa orang-orang survei tersebut hanya melihat bentuk rumahnya saja dan tidak melihat kehidupan orang-orang yang menempatinya. Memang benar rumah mereka jauh lebih bagus namun untuk kehidupan sehari-hari mereka orang tua yang rentan tersebut sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sebab mereka saat ini sudah tidak

bekerja lagi karena usia mereka yang sudah menua. Disamping itu ada pula orang yang berusia sekitar 30 tahunan yang juga mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki serta tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga untuk mendapatkan pekerjaan saja mereka mengalami kesulitan. Pekerjaan yang mereka dapat juga seperti buruh pabrik atau pekerja pabrik yang gajinya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Oleh sebab itu perlu adanya perhatian dan juga uluran tangan dari pemerintah untuk memberikan bantuannya dalam menjamin kehidupan sosial mereka agar tidak mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Pemerintah juga harus peka dalam menangani masalah-masalah sosial yang ada di daerah tertentu dan memberikan sebuah solusi agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan terwujudnya negara yang sejahtera sesuai dengan Pancasila sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah sedikit masukan dari penulis terhadap pemerintah untuk dapat mengcover kehidupan orang tua yang rentan (ageing) dalam menjalani kehidupannya agar terjamin dan terlindungi sehingga tidak mengalami keterbelakangan.

Teori dari Rawls tentang kontrak atau sering disebut dengan *The Original Position*. Rawls mengaitkan langsung teorinya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerjasama sosial yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sedangkan prinsip keadilan yang harus menjadi subjek struktur dasar masyarakat harus merupakan hasil dari persetujuan awal dalam situasi prosedural murni. Tetapi seperti pada sistem kerjasama sosial, keadilan tidak lagi ditentukan oleh orang atau masing-masing warga melainkan oleh sistem dan prinsip pelaksanaannya.

Selanjutnya teori pembangunan menurut Meter dan Horn, mereka membagi lima variabel yang mempengaruhi implementasi dari pembangunan sosial tersebut yaitu (1) Standar dan sasaran kebijakan (2) Sumberdaya (3) Komunikasi antar anggota dan penguatan aktivasi (4) Karakteristik agen pelaksana dan (5) Kondisi Sosial, ekonomi dan politik. Dari variabel-variabel tersebut menurut penulis sangat tepat digunakan dalam menganalisis bantuan sosial yang diberikan kepada *ageing*/orang tua yang rentan agar tidak salah dalam memberikan program bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa permasalahan sosial ini muncul dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia semenjak terjadinya krisis finansial atau sering disebut dengan krisis moneter. Pembangunan sosial dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial serta pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik komprehensif dalam arti bahwa setiap pelayanan sosial yang diberikan harus menempatkan penerima layanan sebagai manusia baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial kulturalnya.

Hal ini mengandung pokok-pokok pikiran bahwa tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial ini mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia dengan fokus utama pada kelompok yang kurang beruntung seperti orang tua/*ageing* atau warga masyarakat yang mengalami masalah sosial. Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam masalah pembangunan kesejahteraan sosial ini adalah Kementerian Sosial. Dengan demikian kesejahteraan rakyat disini mengacu pada konsep pembangunan sosial yang mencakup kesehatan, pendidikan dan kebudayaan maupun agama. Sementara lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial adalah masyarakat yang biasanya dilaksanakan melalui organisasi-organisasi sosial seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

Dalam kasus ini kemudian penulis menganalisa bahwa kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dalam

mensurvei penduduk yang kurang mampu maupun orang tua yang sudah rentan/*ageing* sehingga terjadi gap atau kesenjangan dalam memberikan bantuan sosial yang mengakibatkan kecemburuan di masyarakat karena ada sebagian orang yang mampu namun diberikan bantuan dari pemerintah seperti BLT dan ada sebagian orang yang kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya karena rumah mereka sudah layak huni dan tidak dilihat dari pendapatan mereka sehari-hari. Hal ini sangat fatal apabila program bantuan tersebut dilanjutkan karena tidak tepat sasaran dan menjurus pada perilaku pilih kasih.

Daftar Rujukan:

- Chamsyah, Bachtiar. 2002. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Habib, M. A. F. (2015). *Pergeseran Nilai dan Dukungan Sosial Keluarga pada Orang Tua Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Lansia Miskin di Kabupaten Blitar)*. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Habib, M. A. F., Nisa, K. K., & Al Usrah, C. R. Memikirkan Kembali Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Pasca Konflik: Dampak Sosial Ekonomi pada Masyarakat Kulonprogo, Yogyakarta (Rethinking Post-Conflict of The Development of New Yogyakarta International Airport (NYIA): Social Economic Impact on The Community of Kulonprogo, Yogyakarta). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 373-400.
- Habib, M. A. F., Nisa, K. K., Fatkhullah, M., Al Ursah, C. R., & Budita, A. K. (2022). *SOSIOLOGI EKONOMI: Kajian Teoretis dan Contoh Penerapan*. Tulungagung: Akademia Pustaka
- Hannigan, Lisa. 2011. *Social Assistance: Understanding The Gaps*. dalam *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*, ed Chris Manning dan Sudarno Sumarto (Singapore: ISEAS)
- Manning, Chris dan Sudarno Sumarto(ed). 2011. *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*. Singapore: ISEAS
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologi Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia

- Rokom. 2019. *Indonesia Memasuki Periode Aging Population*. dalam <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Sosial*. Bandung: IKAPI
- Tanaya, AA Raka Riani dan I Gusti Wayan Murjana Yasa. 2015. “Kesejahteraan Lansia dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhi di Desa Danging Puri Kauh”. *Jurnal Piramida Vol. XI No. 1*.